

## **PENDAHULUAN**

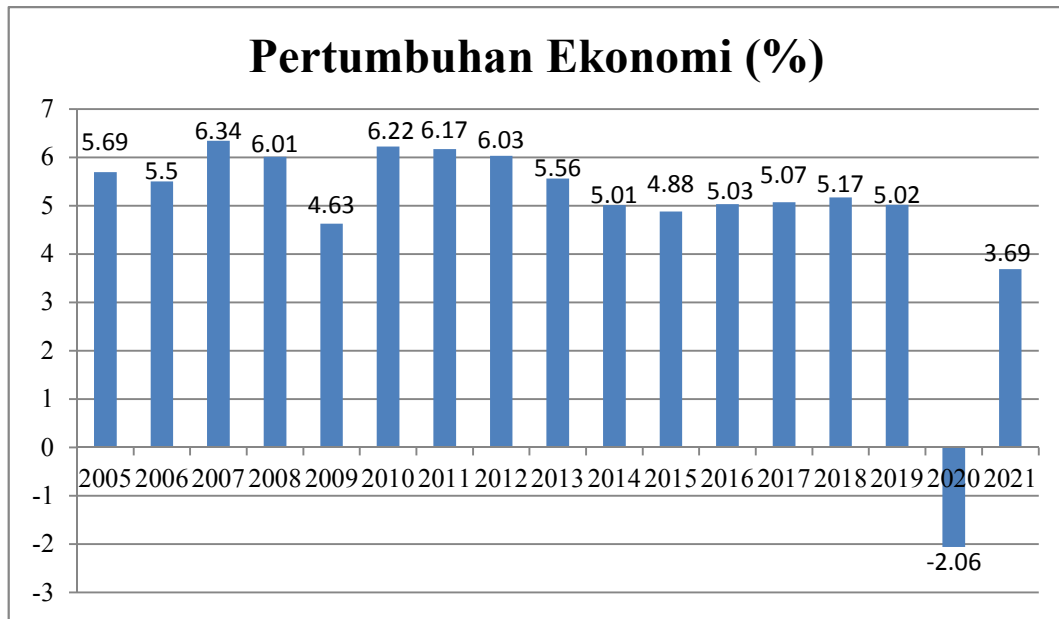
### **Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini adalah sebagai negara berkembang, maka perlu strategi yang tepat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi demi mewujudkan pembangunan nasional yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan secara terus-menerus. Sehingga tercapainya tujuan negara Indonesia yang tercantum di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Maka dari itu hal yang menjadi tolak ukur dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan perubahan tingkatan pengangguran, tenaga kerja, pengeluaran pemerintah dan inflasi.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu parameter yang sangat penting dalam mengukur tingkat perekonomian yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dapat bermanfaat dalam menentukan arah pembangunan ke depan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan ukuran keberhasilan pembangunan setiap negara. Sebagai stabilisator perekonomian, pemerintah harus menjaga fluktuasi pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator sejauh mana kegiatan perekonomian negara tersebut akan menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat pada suatu periode

tertentu. Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat maka pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Gambar 1.1 menggambarkan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama kurun waktu 2005-2021



**Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi 2001-2021**

Pertumbuhan ekonomi tahun 2005 sebesar 5,69 persen, angka pertumbuhan tersebut lebih banyak digerakkan oleh kegiatan konsumsi baik konsumsi rumah tangga maupun konsumsi pemerintah. Tingkat Pertumbuhan ekonomi ini tidak mencapai target sebenarnya sebesar 6,0 persen. Hal ini dikarenakan dampak pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak, kenaikan ini serta merta membuat daya beli masyarakat turun yang kemudian berakibat pada penurunan nilai produksi. Kemudian pada tahun 2006 terjadi penurunan menjadi 5,5 persen kemudian naik kembali pada tahun 2007 menjadi 6,34 persen yang dimana sekaligus pencapaian pertumbuhan tertinggi selama 17 tahun terakhir. Pertumbuhan ini sebagian besar bersumber dari ekspor barang dan

jasa, konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto serta pengeluaran konsumsi pemerintah. Berbeda dengan tahun 2020 terjadi posisi penurunan drastis sebesar -2,06 persen ini dampak adanya pandemi Covid-19, pemerintah melakukan beberapa kebijakan terkait mengurangi penyebaran penyakit virus Covid-19 sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah konsumsi rumah tangga dan konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga, penurunan konsumsi pemerintah, investasi bahkan ekspor dan impor. Kemudian pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kembali naik menjadi 3,69 persen terjadinya peningkatan konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPR, konsumsi pemerintah serta ekspor dan impor seiring pemulihan pandemi Covid-19. (Badan Pusat Statistik)

Kemudian pertumbuhan ekonomi juga tidak lari dari tujuan pembangunan ekonomi yaitu mengatasi pengangguran. Pengangguran terjadi karena disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Ini juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan fiskal, yang dimana pemerintah lebih mengutamakan untuk menjaga inflasi lebih rendah, risikonya pengangguran akan tinggi dan pertumbuhan ekonomi melambat. Begitu juga sebaliknya ketika mengurangi pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi risikonya adalah inflasi akan tinggi, maka konsekuensinya terhadap pengangguran adalah dibiarkan tetap menganggur dan pergerakan tingkat pertumbuhan ekonominya kurang signifikan tetapi dampak positif terhadap inflasi terkontrol.

Suparmoko, M & Yusuf, Furtasan Ali (2017: 217-218) menyatakan bahwa:

Umumnya tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan fiskal adalah kestabilan yang lebih mantap artinya tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa adanya pengangguran yang berarti di satu pihak atau ketidakstabilan harga-harga umum di lain pihak. Dengan kata lain tujuan kebijakan fiskal adalah pendapatan nasional riil terus meningkat pada laju yang dimungkinkan oleh perubahan teknologi dan tersedianya faktor-faktor produksi dengan mempertahankan kestabilan harga-harga umum. Kestabilan ekonomi tidak berarti kestabilan harga untuk semua sektor perekonomian, karena perubahan preferensi konsumen dan tersedianya faktor produksi, agar penggunaan optimum dari semua sumber daya ekonomi dapat terealisasi. Pencegahan timbulnya pengangguran merupakan tujuan yang paling utama dari kebijakan fiskal dan aspek kedua dari kebijakan fiskal adalah mempertahankan kestabilan harga umum pada tingkat yang layak.

Masalah pengangguran merupakan persoalan yang harus di waspadai oleh setiap negara-negara berkembang. Dalam mengatasi pengangguran harus mempunyai strategi pemerataan lapangan pekerjaan karena secara umum pengangguran merupakan angkatan kerja yang belum mendapatkan kesempatan bekerja. Dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja sehingga pencari pekerjaan pun bertambah seiring bertambahnya tenaga kerja. Kebijakan makroekonomi yang berhasil menurunkan tingkat pengangguran dan tingkat inflasi pada suatu negara diduga kuat akan berdampak positif dalam menaikkan pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia. Penurunan tingkat pengangguran akan menaikkan pendapatan perkapita penduduk sehingga dapat meningkatkan konsumsi barang dan jasa. Inflasi yang rendah akan menambah kemampuan daya beli pendapatan penduduk dalam memperoleh barang dan jasa. Penambahan konsumsi barang dan jasa akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan hidup dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menimbulkan masalah dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pengangguran yang

tinggi akan menimbulkan ketimpangan atau ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan. Ketidakmerataan distribusi pendapatan ini menyebabkan adanya ketimpangan sosial atau kesenjangan sosial, dimana terdapat penduduk yang berkekurangan dan berbanding terbalik dengan penduduk yang berkecukupan.

Sukirno (2016: 333) berpendapat bahwa:

Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi.

Inflasi menjadi salah satu Parameter makroekonomi yang sangat memengaruhi aktivitas perekonomian. Inflasi yang terlalu tinggi akan mengganggu kestabilan perekonomian dan akan menurunkan nilai mata uang yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat. Inflasi merupakan salah satu faktor yang dianggap menyebabkan tingkat kemiskinan di Indonesia dapat meningkat. Dapat dikatakan demikian karena jika inflasi naik harga barang-barang umum akan ikut meningkat, hal tersebut membuat masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hal ini lah yang nantinya akan membuat masyarakat jauh dari kata sejahtera.

Jika dilihat dari proses pembangunan nasional maka peran tenaga kerja juga sangat penting dalam kemajuan suatu negara. Oleh karena itu dapat diartikan sumber daya manusia adalah pelaku utama keberhasilan suatu capaian dalam pertumbuhan ekonomi yang memang benar-benar harus ditangani secara khusus sehingga menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki keahlian di bidangnya. Masalah kurangnya penyerapan tenaga kerja juga berakibat fatal

terhadap pertumbuhan ekonomi yang dimana tingkat pengangguran akan semakin bertambah, sehingga berdampak negatif terhadap permintaan konsumen pada produk dan jasa di pasar. Sedangkan secara umum penyerapan tenaga kerja meningkat tergantung pada permintaan konsumen. Semakin tinggi permintaan produk dan jasa maka penyerapan tenaga kerja juga ikut naik. Jika disimpulkan bahwa terjadi siklus perlambatan pertumbuhan ekonomi yang secara terus-menerus. Besar harapan bahwa pemerintah harus ambil bagian dalam penyerapan tenaga kerja ini seluas-luasnya.

Pelaksanaan perekonomian di Indonesia juga tidak lepas dari campur tangan pemerintah yang sudah berupaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan terealisasinya pengeluaran pemerintah dari beberapa sektor baik dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan atau fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan dan perlindungan sosial. Pengeluaran pemerintah yang sudah dikeluarkan dari beberapa sektor tersebut dapat menjadi taksiran yang bisa mendorong perkembangan pada masing-masing bidang dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Disinilah pemerintah menjadi penyedia sarana dan prasarana kebutuhan dasar rakyat yang harus dilaksanakan dengan baik demi taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 1.1 Pengangguran, Tenaga Kerja, Pengeluaran Pemerintah, Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2005-2012**

Tahun	Pengangguran (Orang)	Tenaga Kerja (Orang)	Pengeluaran Pemerintah (Milyar Rupiah)	Inflasi (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2005	11.899.266	93.958.387	509.632	17,11	5,69
2006	10.932.000	95.456.935	667.129	6,60	5,50
2007	10.011.142	99.930.217	757.650	6,59	6,34
2008	9.394.515	102.552.750	985.731	11,06	6,01
2009	8.962.617	104.870.663	937.382	2,78	4,63
2010	8.319.779	108.207.767	1.042.117	6,96	6,22
2011	8.681.392	107.416.309	1.294.999	3,79	6,17
2012	7.344.866	112.504.868	1.491.410	4,30	6,03

**Sumber:** Badan Pusat Statistik Dan Portal APBN Kemenkeu RI Tahun, 2021

Berdasarkan data Tabel 1.1, perubahan tingkat pengangguran masih saja terjadi di Indonesia yang setiap tahun berfluktuasi sehingga menjadi masalah utama yang harus selalu dikontrol atau diawasi secara optimal dan objektif, agar hasilnya dapat memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam tabel terlihat bahwa pengangguran pada tahun 2005 sampai 2010 cenderung menurun bila dibandingkan dengan tahun 2011 yang meningkat menjadi 8.681.392 Orang, kondisi ini disebabkan karena menurunnya jumlah yang bekerja. Kemudian pada tahun 2012 menurun kembali menjadi 7.344.866 Orang dan merupakan jumlah pengangguran terendah selama tujuh tahun terakhir. Keadaan ini juga sebagai dampak karena peningkatan jumlah yang bekerja. Namun jika dibandingkan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 sebesar 6,01 persen dan pada tahun 2009 melambat menjadi 4,63 persen juga sebagai pertumbuhan ekonomi terendah selama tujuh tahun terakhir yang sebagai dampak krisis ekonomi 2008

sampai 2009. Setiawan (2022: 1-2) Krisis keuangan 2008-2009 dipicu oleh kredit macet di sektor properti AS (subprime mortgage). Akibat dari krisis tersebut, ekonomi global juga menurun menjadi 2,8 persen pada tahun 2008 dan 3,07 persen pada tahun 2009.

Berdasarkan data Tabel 1.1, bahwa tenaga kerja dari tahun 2005 cenderung meningkat sampai tahun 2010. Sedangkan pada tahun 2011 turun menjadi 107.416.309 Orang kemudian pada tahun 2012 naik kembali menjadi 112.504.868 Orang. Penyerapan tenaga kerja tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebanyak 112.504.868 Orang dan penyerapan tenaga kerja terendah terjadi pada tahun 2005 sebanyak 93.958.387 Orang. Perubahan penyerapan tenaga kerja di Indonesia dipengaruhi oleh kesempatan kerja setiap tahunnya. Penumpukan jumlah tenaga kerja juga tentu akan memberikan beban tambahan bagi perekonomian suatu negara apabila tidak disertai dengan perluasan dan penciptaan lapangan kerjanya. Jika lowongan kerja baru tidak bisa menampung semua tenaga kerja baru maka akan memperlambat pertumbuhan ekonomi yang ada. Oleh karena itu, tidak diragukan apabila tenaga kerja disebut sebagai salah satu faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data Tabel 1.1, bahwa pengeluaran pemerintah terus mengalami kenaikan dari tahun 2005 hingga tahun 2008. Tetapi pada tahun 2009 pengeluaran pemerintah sebesar 937.382 Miliar rupiah mengalami penurunan sebesar 48.349 Miliar rupiah dari tahun 2008, hal ini disebabkan karena menurunnya penerimaan pemerintah dari pajak dan minat beli masyarakat yang juga menurun. Kemudian pada tahun 2010 pengeluaran pemerintah cenderung



meningkat sampai pada tahun 2012 sebesar 1.491.410. Peningkatan ini di sebabkan karena semakin bertambahnya belanja pemerintahan pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Pengeluaran pemerintah akan meningkat seiring dengan peningkatan kegiatan perekonomian suatu negara/wilayah. Hal ini dapat dijelaskan dalam teori yang dikenal sebagai Hukum Wagner yaitu mengenai adanya korelasi positif antara pengeluaran pemerintah dengan tingkat pendapatan nasional. Walaupun demikian peningkatan pengeluaran pemerintah yang besar belum tentu berakibat baik terhadap aktivitas perekonomian, untuk itu perlu dilihat efisiensi penggunaan pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan Tabel 1.1, tingkat inflasi di Indonesia pada tahun 2005 sampai 2012 mengalami fluktuasi. Inflasi yang cenderung menurun akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada tahun 2005 inflasi sebesar 17,11 persen dan berturut-turut mengalami penurunan sampai pada tahun 2007 menjadi 6,59 persen. Kemudian pada tahun 2008 terjadi kenaikan sebesar 11,06 persen lalu di tahun 2009 mengalami penurunan drastis menjadi 2,78 persen. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 8,28 persen dari tahun sebelumnya yang dimana kondisi ini menjadi tingkat inflasi terendah selama rentang waktu tahun 2005 sampai 2012. Heriawan (2010: 5) menjelaskan “tingkat inflasi yang rendah pada tahun 2009 disebabkan oleh terjadinya deflasi pada barang-barang yang harganya ditetapkan oleh pemerintah seperti bahan bakar minyak dan listrik”. Dengan tingkat inflasi terendah ini Indonesia mampu bertahan dari perlambatan pertumbuhan ekonomi global dari akibat krisis keuangan tahun 2008 sampai 2009. Kemudian inflasi pada tahun 2010 terjadi

peningkatan sebesar 6,96 persen yang dimana hal ini membuktikan bahwa masih adanya dampak goncangan global krisis yang terjadi pada tahun 2009 sehingga tidak mampu ditopang oleh permintaan domestik Indonesia, seperti melonjak nya harga bahan pokok sehingga barang-barang konsumsi pun berkurang. Disisi lain pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 juga ikut naik menjadi 6,22 persen dari 4,63 persen di tahun 2009, yang dimana terjadi hubungan yang positif antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi, begitu juga pada tahun 2011 tingkat inflasi menurun sebesar 3,79 persen di ikuti dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi tahun 2011 sebesar 6,17 persen dari tahun sebelumnya. Namun jika di bandingkan dengan tingkat inflasi pada tahun 2012 terjadi pengaruh yang negatif yang dimana mengalami peningkatan sebesar 4,30 persen dengan pertumbuhan ekonominya turun menjadi 6,03 persen dari tahun 2011. Kedua pengaruh ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang tidak relevan antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan fenomena diatas Peneliti tertarik untuk menganalisis dan meneliti skripsi ini yang berjudul **“Analisis Pengaruh Pengangguran, Tenaga Kerja, Pengeluaran Pemerintah Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2001-2021”**.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2001-2021?
2. Bagaimanakah pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2001-2021?
3. Bagaimanakah pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2001-2021?
4. Bagaimanakah pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2001-2021?

## **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2001-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2001-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2001-2021.
4. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2001-2021.

## **Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis, hasil penelitian ini berharap dapat memberikan sumbangan teori dan memperkaya ragam penelitian serta mampu menambah pengetahuan yang berkaitan dengan pengaruh pengangguran, tenaga kerja, pengeluaran pemerintah dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2001-2021.
2. Kegunaan Praktis, manfaat ini berguna untuk memecahkan masalah sebagai berikut :
  - a. Bagi Pemerintah  
Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan pemerintah Indonesia dan lebih peduli terhadap kemunduran pertumbuhan ekonomi.
  - b. Bagi Akademisi atau Mahasiswa  
Penelitian ini nantinya dapat dijadikan bahan referensi ilmu pengetahuan ekonomi, khususnya tentang pengaruh pengangguran, tenaga kerja, pengeluaran pemerintah dan inflasi.
  - c. Bagi Penulis  
Bagi penulis, penelitian ini untuk memenuhi tugas akademik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Tinjauan Teoritis Variabel Penelitian

#### Pertumbuhan Ekonomi

##### Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu masalah ekonomi jangka panjang atau perubahan keadaan perekonomian suatu negara yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik. Menurut Purba (2021: 35) pertumbuhan ekonomi merupakan rangkuman laju pertumbuhan berbagai sektor ekonomi (lapangan usaha) yang ada di daerah tersebut. Rumus yang sering digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi dalam satu tahun tertentu yang didasarkan atas data PDRB harga konstan adalah:

$$Rg_t = \frac{PDRB^*_t - PDRB^*_{t-1}}{PDRB^*_{t-1}} \times 100\%$$

Menyatakan laju pertumbuhan tahun t,  $PDRB^*_t$  adalah PDRB harga konstan pada tahun t, dan  $PDRB^*_{t-1}$  adalah PDRB harga konstan tahun sebelumnya. Berdasarkan rumus tersebut ada tiga kemungkinan dengan laju pertumbuhan tersebut. Laju pertumbuhan bernilai positif kalau  $PDRB^*_t$  lebih besar dibandingkan dengan  $PDRB^*_{t-1}$ . Sebaliknya, laju pertumbuhan negatif bila  $PDRB^*_t$  lebih kecil dari  $PDRB^*_{t-1}$  dan tidak mengalami pertumbuhan jika  $PDRB^*_t$  sama dengan  $PDRB^*_{t-1}$ .

Pertumbuhan ekonomi yang pesat merupakan fenomena penting yang baru dialami dunia dalam dua abad terakhir. Selama ini, dunia telah mengalami

beberapa perubahan yang sangat nyata dibandingkan musim lalu. Sampai abad ke-18, sebagian besar orang di berbagai negara terus hidup dalam fase subsisten, dan sumber mata pencaharian utama mereka adalah pertanian, perikanan, dan berburu. Saat itu, alat transportasi utama adalah kuda dan berbagai hewan peliharaan lainnya. Kali ini situasinya benar-benar berbeda. Kemampuan manusia untuk pergi ke bulan dan membuat komputer yang canggih adalah contoh nyata seberapa jauh kemajuan manusia dalam 2-3 abad terakhir. Masalah pertumbuhan ekonomi yang selalu diperhatikan dalam analisis makroekonomi adalah masalah pertumbuhan ekonomi yang lambat dari waktu ke waktu. Secara umum, pertumbuhan aktual perekonomian lebih lambat dari potensi pertumbuhannya. Dampak dari keadaan tersebut adalah perekonomian tidak selalu mencapai kesempatan kerja penuh, dan masalah pengangguran merupakan tantangan yang harus selalu dihadapi dan diatasi dalam jangka panjang.

Sukirno (2016: 423) berpendapat bahwa:

Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal. Tetapi dengan menggunakan berbagai jenis data produksi adalah sangat sukar untuk memberikan suatu gambaran tentang mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Oleh sebab itu untuk memberikan suatu gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai sesuatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai.

## **Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Teori pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai pemaparan tentang faktor-faktor apa saja yang dapat menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang dan penjelasan bagaimana faktor-faktor tersebut berpengaruh satu dengan yang lain sehingga terjadi kegiatan pertumbuhan ekonomi.

Beberapa teori yang menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi pada dasarnya menurut Sukirno (2016: 432-437) sebagai berikut:

### **a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik**

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ada empat faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi. Akan tetapi, para ahli ekonomi menganalisis bahwa penambahan jumlah penduduk berpengaruh pada tingkat pertumbuhan ekonomi. Para ahli ekonomi memiliki pandangan bahwa hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini berarti pertumbuhan ekonomi tidak akan terus menerus berlangsung. Menurut pandangan ahli ekonomi klasik, apabila penduduk sedikit dan kekayaan alam relatif berlebihan, tingkat pengembalian modal dari investasi yang dibuat akan tinggi. Maka para pengusaha akan mendapatkan keuntungan yang besar. Ini akan menimbulkan investasi baru dan pertumbuhan ekonomi akan terwujud. Apabila pertumbuhan penduduk sudah terlalu banyak, akan menyebabkan menurunnya tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk akan menjadi negatif. Maka kemakmuran masyarakat akan menurun dan ekonomi akan mencapai tingkat perkembangan yang rendah. Apabila keadaan ini dicapai,

ekonomi dikatakan telah mencapai keadaan tidak berkembang (stationary state). Pada keadaan ini pendapatan pekerja hanya mencapai tingkat cukup hidup (subsistence).

#### **b. Teori Schumpeter**

Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi : memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggi efisien cara memproduksi dalam menghasilkan sesuatu barang ke pasaran-pasaran yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi keefisienan kegiatan perusahaan. Berbagai kegiatan inovasi ini akan memerlukan investasi baru.

Di dalam mengemukakan teori pertumbuhannya Schumpeter memulai analisisnya dengan memisalkan bahwa perekonomian sedang dalam keadaan tidak berkembang. Tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama. Pada waktu keadaan tersebut berlaku, segolongan pengusaha menyadari tentang kemungkinan untuk mengadakan pembaharuan tersebut, mereka akan meminjam modal dan melakukan penanaman modal. Investasi yang baru ini akan meninggikan tingkat kegiatan ekonomi negara. Maka pendapatan masyarakat akan bertambah dan seterusnya konsumsi masyarakat menjadi bertambah tinggi. Kenaikan tersebut akan mendorong perusahaan-perusahaan lain untuk menghasilkan lebih banyak barang dan melakukan penanaman modal baru.



### **c. Teori Harrod-Domar**

Dalam menganalisis mengenai masalah pertumbuhan ekonomi, teori Harrod-Domar bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau steady growth dalam jangka panjang. Analisis Harrod-Domar merupakan pelengkap analisis Keynesian. Dalam analisis Keynesian yang diperhatikan adalah persoalan ekonomi jangka pendek. Melalui analisis Harrod-Domar dapat dilihat bahwa (i) dalam jangka panjang pertambahan pengeluaran agregat yang berkepanjangan perlu dicapai untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, dan (ii) pertumbuhan ekonomi yang teguh hanya mungkin dicapai apabila  $I + G + (X-M)$  terus-menerus bertambah dengan tingkat yang menggalakkan.

### **d. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik**

Teori pertumbuhan Neo-Klasik melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari segi penawaran. Menurut teori ini, yang dikembangkan oleh Abramovits dan Solow pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi.

Analisis Solow selanjutnya membentuk formula matematik untuk persamaan itu dan seterusnya membuat pembuktian secara kajian empiris untuk menunjukkan kesimpulan berikut: faktor terpenting yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukanlah pertambahan modal dan pertambahan tenaga kerja. Faktor yang paling penting adalah kemajuan teknologi dan pertambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja.

## **Faktor-Faktor Yang Menentukan Pertumbuhan Ekonomi**

Sukirno (2016: 429-431) berpendapat bahwa faktor ekonomi penting yang dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yaitu:

a. Tanah Dan Kekayaan Alam Lainnya

Kekayaan alam suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan dan hasil laut yang dapat diperoleh, jumlah dan jenis kekayaan barang tambang. Kekayaan alam dapat mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara terutama pada proses pertumbuhan ekonomi. Apabila negara mempunyai modal yang cukup, teknologi dan teknik produksi yang modern, dan tenaga-tenaga ahli yang dibawa oleh para pengusaha dari luar memungkinkan kekayaan alam itu diusahakan dengan efisien dan menguntungkan.

b. Jumlah Dan Mutu Dari Penduduk Dan Tenaga Kerja

Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat kepada perkembangan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut memungkinkan negara akan menambah produksi. Sebagai akibatnya pendidikan, latihan dan pengalaman kerja, keterampilan penduduk akan semakin tinggi.

c. Barang-Barang Modal Dan Tingkat Teknologi

Barang-barang modal penting artinya dalam mempertinggi koefisien pertumbuhan ekonomi. Apabila barang-barang modal saja yang bertambah sedangkan tingkat teknologi tidak mengalami perkembangan, kemajuan yang akan dicapai akan jauh lebih rendah dari pada yang dicapai pada masa kini . oleh sebab itu dikembangkan lah teknologi yang semakin baik untuk meningkatkan produktivitas barang-barang modal akan mengalami perubahan dan akan berada pada tingkat yang tinggi.

## **Pengangguran**

### **Definisi Pengangguran**

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Menurut Sadono Sukirno, pengangguran adalah keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja, yang telah berusaha mencari pekerjaan, tetapi tidak memperolehnya.

Buulolo, Purba & Sihotang (2020: 72) berpendapat bahwa Pengangguran merupakan salah satu masalah serius dalam pembangunan ekonomi khususnya di Indonesia. Hal ini terjadi karena ketidakseimbangan antara lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, kurangnya keterampilan dan pendidikan, kemajuan teknologi, dan sebagainya.

### **Teori Pengangguran**

Menurut Okun (Astuti, 2016: 77) bahwa Arthur Okun adalah salah seorang pembuat kebijakan paling kreatif pada era sehabis perang. Dia memperhatikan faktor-faktor pembangunan yang membantu Amerika Serikat menelusuri dan mengatur usahanya. Ia membuat konsep output potensial dan menunjukkan hubungan antara output dan penganggur. Penganggur biasanya bergerak bersamaan dengan output pada siklus bisnis. Pergerakan bersama dari output dan pengangguran yang luar biasa ini berbarengan dengan hubungan numerikal yang sekarang dikenal dengan nama Hukum Okun.

## **Jenis-Jenis Penyebab Pengangguran**

Menurut Sukirno (2016: 328-329) pengangguran dibagi atas beberapa bentuk, berdasarkan penyebabnya yaitu :

- a. Pengangguran friksional adalah para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari pekerjaan yang lebih layak. Ketika pengusaha susah memperoleh pekerja. Maka pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Ini akan mendorong pekerja untuk meninggalkan pekerjaan yang lama dan mencari pekerjaan baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya.
- b. Kemerossotan permintaan agregat mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, maka pengangguran kan bertambah. Pengangguran yang wujud tersebut dinamakan pengangguran siklikal.
- c. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan adanya perubahan struktur kegiatan ekonomi.
- d. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi dan mesin sehingga manusia tidak lagi dibutuhkan dalam proses produksi.

## **Berdasarkan Ciri-Cirinya**

Menurut Sukirno (2013: 330-331) pengangguran dibagi berdasarkan cirinya, yaitu:

- a. Pengangguran terbuka adalah pengangguran ini tercipta akibat penambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari penambahan tenaga kerja.
- b. Pengangguran tersembunyi adalah pengangguran yang disebabkan kelebihan tenaga kerja yang digunakan dalam kegiatan ekonomi.
- c. Pengangguran bermusim adalah pengangguran yang disebabkan adanya perubahan musim. Contohnya yaitu pada musim hujan penyadap karet tidak dapat melakukan pekerjaannya sehingga mereka terpaksa menganggur.
- d. Setengah Menganggur adalah pekerja yang hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu atau satu hingga empat jam sehari.

## **Dampak Pengangguran**

Pengangguran yang terjadi dalam suatu perekonomian dapat memiliki dampak atau akibat buruk baik terhadap perekonomian maupun individu dan masyarakat. Salah satu dampak buruk pengangguran terhadap perekonomian yaitu menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan yang mungkin dicapainya. Sedangkan salah satu dampak pengangguran terhadap individu dan masyarakat yaitu pengangguran dapat menyebabkan kehilangan mata percaharian dan pendapatan. Di negara-negara maju, para pengangguran memperoleh tunjangan (bantuan keuangan) dari badan asuransi pengangguran. Oleh sebab itu, mereka masih mempunyai pendapatan untuk membiayai kehidupannya dan keluarganya.

## **Tenaga Kerja**

### **Definisi Tenaga Kerja**

Menurut Subri (2014: 71) bahwa:

Tenaga kerja adalah manpower yang berarti penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator tenaga kerja, bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu.

Berdasarkan pengertian diatas tenaga kerja dalam hal ini mereka yang sedang bekerja. Machmud (2016: 259) berpendapat “bekerja adalah melakukan pekerjaan dengan maksud membantu atau memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam”.

### **Teori Tenaga Kerja**

Menurut teori klasik Adam Smith bahwa sumber daya manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran suatu negara. Alasannya, alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh.

Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu (*necessary condition*) bagi pertumbuhan ekonomi (Subri, 2014: 4).

Berikut beberapa model ekonomi tentang ketenagakerjaan menurut Todaro (1999: 297) yaitu:

### **1. Model Pasar-Bebas Kompetitif Tradisional**

Ciri utama dalam ilmu ekonomi Barat tradisional adalah penonjolan kedaulatan konsumen (*consumer sovereignty*), utilitas atau kepuasan individual (*individual utility*) dan prinsip maksimalisasi keuntungan (*profit maximization*), persaingan sempurna (*perfect competition*) dan efisiensi ekonomi (*economic efficiency*) dengan produsen dan konsumen yang “atomistik”, yakni tidak ada satu pun produsen atau konsumen yang mempunyai pengaruh atau kekuatan cukup besar untuk mendikte harga-harga input maupun output produksi tingkat penyerapan tenaga kerja (*level of employment*) dan harganya (tingkat upah) ditentukan secara bersamaan atau sekaligus oleh segenap harga output dan faktor-faktor produksi (di luar faktor produksi tenaga kerja, tentunya) dalam suatu perekonomian yang beroperasi melalui perimbangan kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran. Produsen meminta lebih banyak tenaga kerja sepanjang nilai produk marjinal (*marginal product*) yang akan dihasilkan oleh penambahan satu unit tenaga kerja (yaitu, produk marjinal atau tambahan secara fisik dikalikan dengan harga pasara atas produk yang dihasilkan oleh tenaga kerja tersebut) melebihi biayanya (tingkat upah). Dengan asumsi bahwa hukum produk marjinal yang semakin menurun (*law of diminishing marginal product*) berlaku (artinya penambahan tenaga kerja yang berikutnya pasti akan memberi hasil

marjinal yang lebih kecil daripada tenaga kerja sebelumnya) dan harga produk ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar, maka nilai produk marjinal tenaga kerja tersebut (identik dengan kurva permintaan tenaga kerja) akan memiliki kemiringan yang negatif atau mengarah dari bawah ke atas. Hal ini berarti tenaga kerja yang direkrut selanjutnya oleh pihak pengusaha atau produsen akan mendapatkan tingkat upah yang lebih rendah dari pada tenaga kerja sebelumnya.

Pada sisi penawaran, setiap individu diasumsikan selalu berpegang teguh pada prinsip maksimalisasi kepuasan. Mereka akan membagi waktunya untuk bekerja dan santai berdasarkan kepuasan atau marginl utility masing-masing kegiatan itu secara relatif. Apabila harga sesuatu barang naik, maka pihak produsen akan segera menaikkan penawarannya. Seandainya saja tingkat upah mengalami kenaikan, maka penawara tenaga kerja akan meningkat. Motivasi kerja mereka bertambah karena adanya tawaran upah yang lebih tinggi dari pada sebelumnya. Keadaan ini akan berpengaruh positif terhadap kurva penawaran tenaga kerja. Kemudian hanya ada satu titik yang akan melambangkan tingkat ekuilibrium, jumlah tenaga kerja yang akan ditawarkan oleh individu (pasar tenaga kerja) sama besarnya dengan yang diminta.

## **2. Model Makro Output-Kesempatan kerja**

Model ini berfokus kepada hubungan-hubungan antara akumulasi modal, pertumbuhan output industri dan penciptaan lapangan kerja. Hubungan ini menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah yang khusus dirancang untuk mempromosikan industrialisasi secara berlebihan seringkali dapat mengorbankan kepentingan sektor pertanian yang masih merupakan tulang punggung



perekonomian negara, cenderung memperparah masalah pengangguran baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

### **3. Model Mikro Insentif-Harga**

Model ini merupakan salah satu teori Neoklasik yang mana para produsen diasumsikan menghadapi dua harga relatif faktor produksi yaitu produksi modal dan tenaga kerja. Mereka harus menggunakan kombinasi modal dan tenaga kerja yang tersedia sedemikian rupa sehingga dapat meminimumkan biaya produksi dalam rangka mencapai laba yang maksimal. Selanjutnya, diasumsikan pula bahwa para produsen mampu memproduksi output dengan berbagai proses teknologi produksi mulai dari teknologi padat karya hingga padat modal. Jadi, apabila harga modal lebih mahal dibandingkan harga buruh, maka pengusaha atau para produsen tersebut akan memilih teknik produksi padat karya. Sebaliknya, apabila harga relatif tenaga kerja ternyata lebih mahal dari pada harga modal, maka para produsen tersebut akan mempergunakan metode produksi padat modal. Pendeknya, mereka senantiasa akan memilih teknologi produksi yang hemat memakai faktor produksi yang harganya relatif rendah.

### **Klasifikasi Tenaga Kerja**

Menurut Pujoalwanto (2014: 108) terdapat beberapa klasifikasi tenaga kerja:

#### **a. Berdasarkan Penduduknya**

Tenaga kerja yaitu seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Dan bukan

tenaga kerja yaitu mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan pekerjaan.

b. Berdasarkan Batas Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-16 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya.

c. Berdasarkan Kualitas

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan non-formal. Kemudian tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Dan tenaga kerja tidak terdidik adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja.

## **Jenis-Jenis Tenaga Kerja**

Manurung (2020: 20-22) bahwa terdapat jenis-jenis tenaga kerja:

a. **Menurut Kemampuannya:**

Berdasarkan skill atau kemampuan, yang pertama adalah tenaga kerja terdidik dengan riwayat menempuh pendidikan tinggi seperti lulusan sarjana. Yang kedua adalah tenaga kerja terlatih, yang dimaksud adalah orang-orang yang bekerja dengan menggunakan keterampilan. Tenaga kerja jenis ini tidak selalu mengenyam pendidikan tinggi, tapi menguasai skill tertentu dan juga cepat dalam

belajar. Yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik. Tenaga kerja jenis ini terdiri dari orang-orang yang tidak mengenyam bangku pendidikan dan juga tidak punya kemampuan khusus.

**b. Menurut Sifatnya:**

Apabila dilihat berdasarkan sifatnya, maka tenaga kerja dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah tenaga kerja rohani, yang bekerja dengan menggunakan otaknya, Yang kedua adalah tenaga kerja jasmani, Yaitu tipe orang yang bekerja dengan menggunakan tenaganya.

**c. Menurut Hubungan dengan Produk:**

Tenaga kerja menurut hubungan dengan produk ini dibagi atas dua golongan, Yang pertama adalah tenaga kerja langsung. Dimana pekerja langsung terjun dalam proses pembuatan produk. Yang Kedua adalah tenaga kerja tidak langsung, dimana pekerja tidak langsung ikut dalam proses pembuatan produk.

**d. Menurut Jenis Pekerjaannya:**

Dilihat dari jenis pekerjaannya maka tenaga kerja dibagi menjadi tiga golongan. Pertama adalah tenaga kerja lapangan kedua adalah tenaga kerja pabrik seperti buruh produksi, dan yang ketiga adalah tenaga kerja kantor atau perusahaan.

## **Pengeluaran Pemerintah**

### **Definisi Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat digunakan sebagai parameter besarnya kegiatan pemerintah suatu negara, karena aktivitas atau kebijakan pemerintah dalam perekonomian bersumber dari pengeluaran pemerintah. Banyaknya pengeluaran pemerintah yang akan digunakan dalam suatu periode tertentu tergantung dari banyak faktor antara lain estimasi pajak yang akan diterima, kebijakan terhadap dampak ekonomi, target pertumbuhan ekonomi serta pertimbangan sosial-politik dan keamanan sehingga dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah dalam rentang waktu tertentu terjadi peningkatan ataupun penurunan oleh karena itu dapat diketahui seberapa besar perubahan yang terjadi dalam rentang waktu tersebut dan tidak didasarkan pada tingkat pendapatan nasional dan pertumbuhan pendapatan nasional.

Sukirno (2016: 168) berpendapat bahwa:

Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting, artinya dalam pembangunan adalah beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara.

### **Teori Pengeluaran Pemerintah**

Ada beberapa pakar ekonom yang mengemukakan teori-teori tentang pengeluaran pemerintah, berikut adalah beberapa teori tentang pengeluaran pemerintah menurut Wahyuningsih (2020: 204-207):

## **1. Model Pembangunan tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah**

Model ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. Sebenarnya peranan pemerintah tidak kalah besar dengan peranan swasta. Semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan kegagalan pasar yang terjadi.

Rostow mengatakan bahwa dalam perkembangan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial. Sedangkan Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap GNP semakin besar dan investasi pemerintah terhadap GNP akan semakin kecil pada tingkat lebih lanjut.

## **2. Hukum Wagner Mengenai Perkembangan Aktivitas Pemerintah**

Wagner mengemukakan model teori tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin membesar dalam persentase terhadap GNP yang didasarkan pada pengamatan di negara-negara Eropa USA dan Jepang pada abad

ke-19. Peningkatan pengeluaran pemerintah tersebut disebabkan perang, meningkatnya fungsi perbankan, perkembangan demokrasi serta meningkatnya fungsi pembangunan. Hukum Wagner menyebut bahwa “Dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan Per Kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat”. Wagner menjelaskan peranan pemerintah yang semakin besar karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbal balik dalam masyarakat, pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya.

Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut *Organic theory of the state* yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat.

### **3. Teori Peacock dan Wiseman**

Teori ini memandang bahwa pemerintah selalu berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar, sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari pemungutan suara. Mereka percaya bahwa masyarakat mempunyai tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka memiliki kesediaan untuk membayar pajak. Menurut mereka perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh

karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GDP (Gross Domestic Product) menyebabkan penerimaan pemerintah menjadi semakin besar. Apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalkan karena ada perang, maka pemerintah harus memperbesar pengeluaran untuk membiayai perang. Karena itu penerimaan pemerintah dari pajak juga harus meningkat, dan pemerintah meningkatkan penerimaannya dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang.

### **Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah**

Menurut Suparmoko & Yusuf (2017: 41) pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu:

1. Pengeluaran yang “*self-liquidating*” sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa-jasa/barang-barang bersangkutan. Misalnya pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan Negara, atau untuk proyek-proyek produktif barang ekspor.
2. Pengeluaran yang *reproduktif*, artinya pengeluaran yang mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomis bagi masyarakat, dengan naiknya tingkat penghasil dan sasaran pajak lain yang pada akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah. Misalnya untuk bidang pengairan, pertanian, pendidikan, kesehatan masyarakat dan sebagainya.
3. Pengeluaran yang “*tidak self-liquidating*” maupun dan “*tidak reproduktif*” yaitu pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat, misalnya pengeluaran untuk bidang-bidang rekreasi, pendidikan

monument, objek-objek tourisme dan sebagainya. Dalam hal ini dapat juga mengakibatkan naiknya pendapatan nasional melalui penjualan jasa-jasa tadi.

4. Pengeluaran yang *secara langsung tidak produktif* dan merupakan *pemborosan* misalnya untuk pembiayaan pertahanan atau perang meskipun pada saat pengeluaran terjadi penghasilan perorangan yang menerimanya akan naik.
5. Pengeluaran yang merupakan *penghematan dimasa yang akan datang* misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu. Kalau hal ini tidak dijalankan sekarang, kebutuhan-kebutuhan pemeliharaan bagi mereka dimasa mendatang pada waktu usia yang lebih lanjut pasti akan lebih besar.

Menurut Suparmoko & Yusuf (2017: 24-27) menyebutkan sebab-sebab pengeluaran pemerintah yaitu:

1. Adanya perang dan pergolakan dalam masyarakat
2. Kenaikan tingkat penghasilan dalam masyarakat
3. Ada urbanisasi yang membarengi perkembangan ekonomi
4. Perkembangan demokrasi
5. Pemborosan dan korupsi
6. Pembangunan ekonomi
7. Program kesejahteraan sosial
8. Perubahan iklim

Sejak tahun 2005 mulai ditetapkan penyatuan anggaran antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan serta pengklasifikasian anggaran



belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja, organisasi dan fungsi. Klasifikasi belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain (Postur APBN Indonesia).

### **Peran Pengeluaran Pemerintah**

Menurut Wahyuningsih (2020: 28-33) dalam perekonomian modern , peranan pemerintah dapat dikualifikasikan dalam 3 golongan besar yaitu:

1. Peranan Alokasi, tidak semua barang dan jasa yg ada dapat disediakan oleh sektor swasta. Barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar ini disebut barang publik, yaitu barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Sedangkan barang swasta adalah barang yang dapat disediakan melalui sistem pasar, yaitu melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Adanya barang yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar ini disebabkan karena adanya kegagalan sistem pasar (market failure).
2. Peranan distribusi, peranan pemerintah dalam bidang alokasi adalah untuk mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien. Peranan lain pemerintah adalah sebagai alat distribusi pendapatan atau kekayaan. Masalah keadilan dalam distribusi pendapatan merupakan masalah yang rumit dalam ilmu ekonomi.
3. Peranan stabilisasi, Perekonomian yang sepenuhnya diserahkan kepada sektor swasta akan sangat peka terhadap guncangan keadaan yang akan menimbulkan pengangguran dan inflasi

Instrumen kebijakan stabilisasi terdiri atas :

- a. Instrumen Moneter, kebijakan moneter yang merupakan komponen kebijakan stabilisasi diantaranya adalah cadangan wajib (reserve requirement), tingkat diskonto, kebijakan pasar terbuka dan pengendalian kredit selektif
- b. Instrumen Fiskal, Kebijakan fiskal juga berpengaruh terhadap permintaan. Peningkatan pengeluaran (anggaran belanja) pemerintah bersifat ekspansioner dengan meningkatnya permintaan, Pertama-tama pada sektor pemerintah dan kemudian menjalar ke sektor swasta.

Ketiga macam peranan pemerintahan tadi potensial menimbulkan kesulitan penyerasian atau bahkan pertentangan kebijakan. Contohnya dalam kapasitas selaku stabilisator, pemerintah harus mengendalikan inflasi. Apabila hal itu ditempuh dengan cara mengurangi pengeluarannya, agar permintaan agregat terkendali sehingga tidak tambah memicu kenaikan harga-harga, maka porsi pengeluaran pemerintah untuk lapisan masyarakat atau pihak atau sektor yang harus dibantu dapat turut dikurangi. Padahal justru dengan pengeluaran itulah pemerintah dapat menjalankan distributifnya.

## **Inflasi**

### **Definisi Inflasi**

Menurut Fahmi (2019: 77) bahwa:

Inflasi merupakan suatu kejadian yang menggambarkan situasi dan kondisi dimana harga barang mengalami kenaikan dan nilai mata uang mengalami pelemahan, dan jika ini terjadi secara terus-menerus maka akan mengakibatkan pada memburuknya kondisi ekonomi secara menyeluruh serta mampu mengguncang tatanan politik suatu negara.

Indikator untuk mengukur kenaikan tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu dalam tingkat inflasi dalam perekonomian dalam waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Adapun rumus untuk menghitung tingkat inflasi berdasarkan PDB harga konstan adalah:

$$In = \frac{IHK_n - IHK_{n-1}}{IHK_{n-1}} \times 100\%$$

Dimana:

$In$  = Inflasi.

$IHK_n$  = Indeks harga konsumen tahun dasar.

$IHK_{n-1}$  = Indeks harga konsumen tahun berikutnya.

## **Teori Inflasi**

Beberapa model yang menganalisis fluktuasi-fluktuasi dalam perekonomian secara keseluruhan dengan model permintaan dan penawaran (model of aggregate demand aggregate supply) menurut Mankiw (2006: 293) yaitu:

### **1. Kurva Permintaan Agregat (Aggregate-Demand Curve)**

Kurva permintaan agregat pada dasarnya melambangkan jumlah dari seluruh barang dan jasa yang diminta dalam suatu perekonomian pada setiap harga. Bentuk kurva permintaan agregat miring ke bawah artinya jika hal lain sama, penurunan tingkat harga keseluruhan akan cenderung meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diminta. Kurva permintaan agregat miring ke bawah karena konsumen merasa lebih kaya sehingga meningkatkan permintaan barang-barang konsumsi. Suku bunga turun sehingga mendorong naiknya permintaan barang-barang investasi dan nilai tukar mata uang terdepresiasi sehingga mendorong naiknya permintaan ekspor neto.

Ada beberapa komponen yang dapat menggeserkan kurva permintaan agregat berdasarkan jenis pengeluaran yang paling terpengaruh olehnya, yaitu:

1. Pergeseran yang berasal dari konsumsi adalah peristiwa yang membuat konsumen mengeluarkan uang lebih banyak pada tingkat harga tertentu (pemotongan pajak) menggeser kurva permintaan agregat ke kanan dan peristiwa yang menyebabkan konsumen mengurangi pengeluarannya pada tingkat harga tertentu (kenaikan pajak, kelesuan pasar saham) menggeser kurva permintaan agregat ke kiri.

2. Pergeseran yang berasal dari investasi adalah peristiwa yang menyebabkan perusahaan melakukan lebih banyak investasi pada tingkat harga tertentu (optimisme mengenai masa depan, penurunan suku bunga akibat kenaikan jumlah uang yang beredar) menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Peristiwa yang menyebabkan perusahaan mengurangi investasinya pada tingkat harga tertentu (pesimisme mengenai masa depan, peningkatan suku bunga akibat penurunan jumlah uang yang beredar) menggeser kurva permintaan agregat ke kiri.
3. Pergeseran yang berasal dari pembelanjaan pemerintah adalah peningkatan pembelanjaan pemerintah untuk barang dan jasa (pembangunan jalan raya atau untuk pertahanan) menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Penurunan jumlah pembelanjaan pemerintah untuk barang dan jasa (memotong anggaran untuk jalan raya dan untuk pertahanan) menggeser kurva permintaan agregat ke kiri.
4. Pergeseran yang berasal dari ekspor neto adalah peristiwa yang meningkatkan pengeluaran ekspor neto pada tingkat harga tertentu (terjadinya “ledakan” di pasar luar negeri, depresi nilai tukar) menggeser kurva permintaan ke kanan. Peristiwa yang mengurangi pengeluaran ekspor neto pada tingkat harga tertentu (resesi di pasar luar negeri, apresiasi nilai tukar) menggeser kurva permintaan agregat ke kiri.

## **2. Kurva Penawaran Agregat (Aggregate-Supply Curve)**

Kurva penawaran agregat menyatakan jumlah keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi serta dijual pada setiap tingkat harga oleh berbagai

perusahaan. Bentuk kurva penawaran agregat memperlihatkan suatu hubungan yang sangat bergantung pada periodenya yaitu:

a. Kurva Penawaran Agregat Jangka Panjang Berbentuk Vertikal

Dalam jangka panjang, produksi barang dan jasa dari suatu perekonomian bergantung pada penawaran tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam serta teknologi yang tersedia yang digunakan untuk mengubah fakto-faktor produksi tersebut menjadi barang dan jasa. Karena tingkat harga tidak memengaruhi penentu-penentu jangka panjang dari PDB riil, maka kurva penawaran agregat jangka panjang berbentuk vertikal. Dengan kata lain, dalam jangka panjang, tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan teknologi menentukan jumlah total barang dan jasa yang ditawarkan, dan jumlah ini tetap sama terlepas dari tingkat harga yang berlaku. Posisi kurva penawaran agregat jangka panjang menunjukkan jumlah barang dan jasa yang diramalkan oleh teori ekonomi makro klasik. Tingkat produksi tersebut sering kali disebut output potensial atau output tingkat kerja optimal atau yang sering juga dikenal sebagai tingkat output alamiah karena menunjukkaproduksi ekonomi ketika pengangguran berada pada tingkat alamiah atau normal. Tingkat output alamiah adalah tingkat produksi yang akan terjadi dalam perekonomian jangka panjang.

Berikut beberapa pengelompokkan pergeseran kurva penawaran agregat jangka panjang, yaitu:

1. Pergeseran yang berasal dari tenaga kerja: dimisalkan bahwa suatu perekonomian memiliki tingkat imigrasi yang tinggi. Karena jumlah pekerja akan lebih besar, maka jumlah barang dan jasa yang ditawarkan juga akan

naik, akibatnya kurva penawaran agregat jangka panjang akan bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika banyak pekerja yang meninggalkan perekonomian, maka kurva penawaran agregat jangka panjang akan bergeser kiri.

2. Pergeseran yang berasal dari modal: kenaikan jumlah modal dalam suatu perekonomian akan meningkatkan produktivitas dan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Akibatnya, kurva penawaran agregat jangka panjang bergeser ke kanan. Sebaliknya, berkurangnya jumlah modal dalam suatu perekonomian akan menurunkan produktivitas dan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan, yang kemudian menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang ke kiri. Terlepas dari kita membahas modal fisik atau sumber daya manusia. Peningkatan jumlah mesin maupun jumlah lulusan perguruan tinggi akan meningkatkan kemampuan perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa. Jadi, kedua hal tersebut akan menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang ke kanan.
3. Pergeseran yang berasal dari sumber daya alam: produksi perekonomian yang bergantung pada sumber daya alamnya, termasuk tanah, barang tambang, dan cuaca. Penemuan cadangan barang tambang baru akan menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang ke kanan. Perubahan pola cuaca yang membuat pertanian lebih sulit dilakukan akan menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang ke kiri.
4. Pergeseran yang berasal dari pengetahuan teknologi: dalam perekonomian melakukan produksi lebih banyak dibandingkan generasi sebelumnya adalah semakin canggihnya teknologi kita. Penemuan di bidang komputer,

misalnya telah memungkinkan manusia memproduksi lebih banyak barang dan jasa dengan berapa pun jumlah modal, tenaga kerja, dan sumber daya alam yang tersedia. Dengan demikian, kurva penawaran agregat jangka panjang bergeser ke kanan. Kemudian banyak peristiwa lain yang berperan seperti perubahan teknologi. Dilaksanakannya perdagangan internasional mempunyai dampak yang mirip dengan penemuan proses produksi baru, sehingga hal tersebut juga menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang ke kanan. Sebaliknya, jika pemerintah menjalankan kebijakan baru yang menghalangi perusahaan untuk menggunakan beberapa metode produksi tertentu, misalnya karena metode produksi tersebut terlalu berbahaya bagi para pekerja, maka kurva penawaran agregat jangka panjang bergeser ke kiri.

b. Kurva Penawaran Agregat Jangka Pendek Miring ke Atas

Kurva penawaran agregat miring ke atas artinya dalam periode satu atau dua tahun, naiknya tingkat harga keseluruhan dalam perekonomian cenderung menaikkan jumlah penawaran barang dan jasa, dan penurunan tingkat harga cenderung mengurangi jumlah penawaran barang dan jasa.

Berikut beberapa teori yang menjelaskan kurva penawaran agregat jangka pendek miring ke atas, yaitu:

1. Teori kekakuan upah: penurunan tingkat harga yang tidak terduga akan meningkatkan upah riil, menyebabkan perusahaan mempekerjakan lebih sedikit pekerja dan memproduksi jumlah barang dan jasa yang lebih sedikit.



2. Teori kekakuan harga: penurunan tingkat harga yang tidak terduga membuat perusahaan mengenakan harga yang lebih tinggi dari yang dikehendaki, menekan penjualan dan mendorong perusahaan untuk mengurangi produksi.
3. Teori kesalahan persepsi: penurunan tingkat harga yang tidak terduga dapat menimbulkan anggapan pada produsen bahwa harga relatif produk mereka telah menurun, sehingga mendorong mereka untuk mengurangi produksi.

Berikut beberapa penyebab pergeseran kurva penawaran agregat jangka pendek, yaitu:

1. Pergeseran yang berasal dari tenaga kerja: peningkatan jumlah tenaga kerja yang tersedia (mungkin akibat penurunan tingkat pengangguran alamiah) menggeser kurva penawaran agregat ke kanan. Penurunan jumlah tenaga kerja yang tersedia (mungkin akibat penurunan tingkat pengangguran alamiah) menggeser kurva penawaran agregat ke kiri.
2. Pergeseran yang berasal dari modal: peningkatan sumber daya manusia atau modal fisik menggeser kurva penawaran agregat ke kanan. Penurunan sumber daya manusia atau modal fisik menggeser kurva penawaran agregat ke kiri.
3. Pergeseran yang berasal dari sumber daya alam: peningkatan ketersediaan sumber daya alam menggeser kurva penawaran agregat ke kanan. Penurunan ketersediaan sumber daya alam menggeser kurva penawaran agregat ke kiri.
4. Pergeseran yang berasal dari teknologi: peningkatan pengetahuan teknologi menggeser kurva penawaran agregat ke kanan. Penurunan teknologi yang

tersedia (karena peraturan pemerintah) menggeser kurva penawaran agregat ke kiri.

5. Pergeseran yang berasal dari tingkat harga yang diharapkan: penurunan tingkat harga yang diharapkan menggeser kurva penawaran agregat jangka pendek ke kanan. Peningkatan tingkat harga yang diharapkan menggeser kurva penawaran agregat jangka pendek ke kiri.

## **Jenis-Jenis Inflasi**

Menurut Boediono (2001: 163-167) terdapat beberapa jenis inflasi yaitu:

1. **Inflasi dilihat dari tingkat keparahan.**
  - a. Inflasi ringan, kenaikan harga barang masih di bawah angka 10% dalam setahun.
  - b. Inflasi sedang, kenaikan harga hingga 30% per tahun
  - c. Inflasi tinggi, kenaikan harga barang atau jasa berkisar 30%-100%
  - d. Hiperinflasi, kenaikan harga barang melampaui angka 100% per tahun. Dalam situasi tersebut, kebijakan fiskal dan moneter dari otoritas seringkali tak memberi dampak signifikan.
2. **Inflasi berdasarkan sebabnya, dapat digolongkan menjadi 2, yaitu:**
  - a. Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat. Inflasi semacam ini disebut demand inflation.
  - b. Inflasi yang timbul karena kenaikan ongkos produksi, ini disebut cost inflation.
3. **Inflasi berdasarkan asalnya, dapat digolongkan menjadi 2, yaitu:**
  - a. Inflasi domestik (domestic inflation)  
Domestic inflation terjadi karena faktor situasi dan kondisi yang terjadi di dalam negeri, seperti karena kebijakan pemerintah (government policy) dalam mengeluarkan deregulasi yang mampu memengaruhi kondisi kenaikan harga.
  - b. Inflasi Impor (imported inflation)  
Imported inflation disebabkan karena faktor situasi dan kondisi yang terjadi di luar negeri seperti terjadinya goncangan ekonomi di Negara Amerika Serikat yang memberi pengaruh pada naiknya berbagai barang yang berasal dari Negara Amerika.

## **Hubungan Teoritis Antar Variabel Penelitian**

### **Hubungan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia**

Hubungan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan dengan hukum okun (okun's law), diambil dari nama Arthur Okun, ekonom yang pertama kali mempelajarinya, yang menyatakan adanya pengaruh empiris antara pengangguran dengan output dalam siklus bisnis. Hasil studi empirisnya menunjukkan bahwa penambahan 1 (satu) point pengangguran akan mengurangi GDP (Gross Domestic Product) sebesar 2 persen. Ini berarti terdapat pengaruh yang negatif antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Penurunan pengangguran memperlihatkan ketidakmerataan, hal ini mengakibatkan konsekuensi distribusional.

Ditinjau dari sudut individu, pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya. Ketiadaan pendapatan menyebabkan para pengangguran harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. Apabila pengangguran di suatu negara adalah sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

## **Hubungan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia**

Menurut Todaro terdapat tiga model dalam menganalisis yaitu dengan model pasar-bebas kompetitif tradisional, model makro output-kesempatan kerja, dan model mikro insentif-harga. Dalam analisis tersebut disimpulkan bahwa tenaga kerja akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dikarenakan tenaga kerja akan memengaruhi aktifitas bisnis dan perekonomian di Indonesia, yang dimana ketika jumlah dan kualitas tenaga kerja semakin meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat dikarenakan meningkatnya jumlah lapangan kerja yang semakin bertambah dari tahun ke tahun, sehingga dimana daya produksi barang dan jasa akan meningkat atau dapat dikatakan bisnis dan perekonomian di Indonesia akan maju.

## **Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia**

Menurut Samuelson (Pujoalwanto, 2014:180) secara garis besar pemerintah mempunyai tiga fungsi utama, yakni meningkatkan efisiensi menciptakan keadilan dan melaksanakan kebijakan stabilisasi pemerintah yang baik harus senantiasa berusaha menghindari dan memperbaiki kegagalan pasar demi tercapainya efisiensi. Pemerintah juga harus memperjuangkan pemerataan melalui program perpajakan dan redistribusi pendapatan untuk kelompok atau golongan masyarakat tertentu. Pemerintah harus menggunakan perangkat perpajakan, pembelanjaan dan peraturan moneter untuk menggapai stabilitas dan memacu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Menurut Due (Wahyuningsih, 2014: 217) pemerintah dapat memengaruhi tingkat GNP (Gross National Product) nyata dengan mengubah persediaan berbagai faktor yang dapat dipakai dalam produksi, melalui program-program pengeluaran misalnya pendidikan. Kemudian pemerintah dapat memengaruhi pola distribusi pendapatan riil melalui penyediaan keuntungan-keuntungan di satu pihak, dan pengurangan pendapatan riil dari sektor swasta di lain pihak. Dan program-program pengeluaran serta pembiayaan akan dapat memengaruhi tingkat pencapaian full-employment dengan mengubah pengeluaran total dalam perekonomian, karenanya akan mengubah GNP dan memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah dan tergantung dari besarnya penerimaan pemerintah, apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut merupakan pencerminan pengeluaran pemerintah. Sehingga pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat akan menjadi pendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

### **Hubungan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia**

Dalam teori Mankiw dijelaskan mengenai fluktuasi-fluktuasi yang terjadi dalam perekonomian secara keseluruhan. Ia menganalisis dengan menggunakan dua model yaitu permintaan dan penawaran (model of aggregate demand aggregate supply). Yang dapat disimpulkan bahwa Inflasi akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dikarenakan inflasi akan

memengaruhi aktivitas perekonomian yang menyebabkan ketidakpastian ekonomi di masa depan, sehingga menyebabkan pengangguran yang akan meningkat dan akan membuat permasalahan perekonomian yang lainnya. Maka pemerintah berusaha untuk mengurangi dan membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan perekonomian yang bertujuan untuk mengurangi tingkat inflasi untuk perkembangan pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

### **Hasil Penelitian Terdahulu**

Pada bagian ini ada beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya yang mendasari pemikiran penulis dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Ardiansyah (2017: 5) yang berjudul "Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia". Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat di ambil kesimpulan bahwa variabel inflasi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tingkat inflasi yang tinggi akan menurunkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal yang dapat meningkatkan inflasi di Indonesia salah satunya dikarenakan kenaikan harga bahan bakar minyak.

Dan hasil penelitian Simanungkalit (2020: 338) yang berjudul "Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1983-2014". Menghasilkan kesimpulan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1983-2014, ini terlihat

dari hasil uji signifikan uji F, yang menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi”.

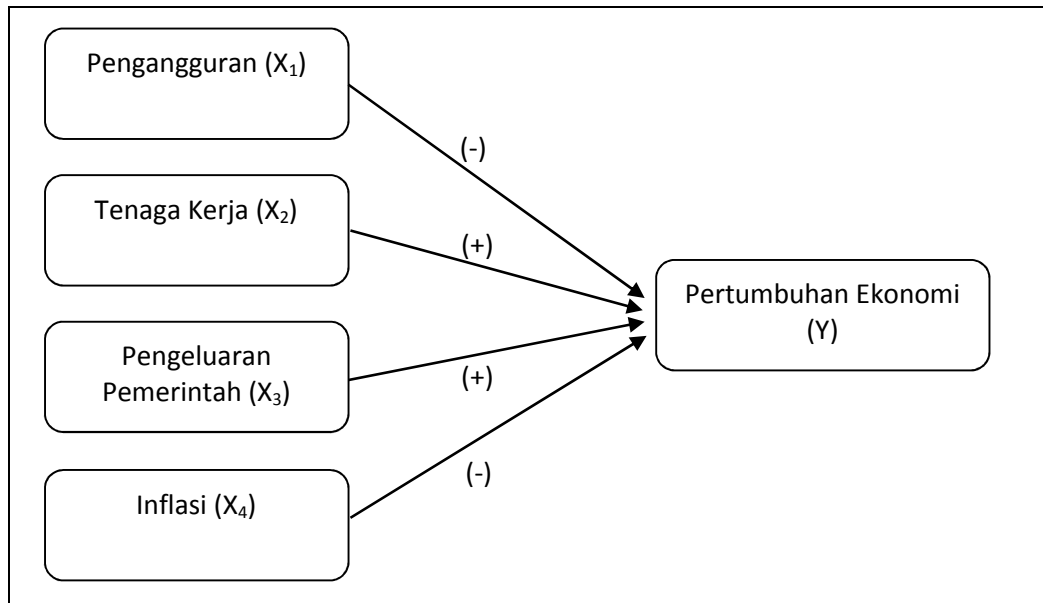
2. Penelitian Sihotang, Samuel (2019: 66) dengan judul “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 2000-2017”. Dengan Kesimpulan sebagai berikut:
  - a. Jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2017. Artinya jika terjadi peningkatan jumlah penduduk maka tidak terlalu memengaruhi kemiskinan di Indonesia.
  - b. Jumlah pengangguran memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2017. Hal ini terjadi karena kebutuhan masyarakat yang banyak dan beragam membuat mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhannya hal yang dilakukan adalah bekerja untuk menghasilkan pendapatan.
  - c. Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2017. Artinya peningkatan pengeluaran pemerintah akan menurunkan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Berdasarkan Uji F jumlah penduduk, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2017.

3. Penelitian Putri, Arista Andalana Iskandar (2018: 10-11) dengan judul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja Dan Inflasi Terhadap Pengangguran Di Indonesia Tahun 1986-2016” hasil penelitian menunjukkan bahwa:
  - a. Berdasarkan hasil estimasi data time series, maka terpilih model yang terbaik yaitu Partial Adjustment Model.
  - b. Berdasarkan hasil penelitian dalam jangka panjang maupun jangka pendek, variabel pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran, dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran pada tahun 1986-2016. Dan variabel penanaman modal asing berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengangguran dan variabel inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran di Indonesia pada tahun 1986-2016 pada tingkat  $\alpha$  sampai dengan 10%.



## Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran teoritis merupakan suatu diagram yang secara garis besar menjelaskan secara logika dalam sebuah penelitian, yang berdasarkan pertanyaan penelitian dan mempresentasikan suatu konsep pada hubungan.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## **Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2001-2021.
2. Tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2001-2021.
3. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2001-2021.
4. Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2001-2021.

## **METODE PENELITIAN**

### **Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dibuat untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu pengangguran, tenaga kerja, pengeluaran pemerintah dan inflasi.

Berdasarkan tingkat eksplanasinya, penelitian ini termasuk dalam penelitian asosiatif dengan bentuk hubungan kausal. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat sehingga dalam penelitian ini terdapat variabel independen (variabel yang memengaruhi) dan variabel dependen (variabel yang dipengaruhi).

### **Jenis Dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kuantitatif, yaitu data pertumbuhan ekonomi, pengangguran, tenaga kerja, pengeluaran pemerintah, dan inflasi. Data yang digunakan adalah data deret waktu (*time series*) tahun 2001-2021.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk angka yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Portal Data APBN Kemenkeu RI.

### **Metode Analisis Data**

#### **Model Kuantitatif**

Metode yang digunakan untuk menganalisis pengaruh pengangguran, tenaga kerja, pengeluaran pemerintah dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2001-2021 adalah metode analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah teknik analisis yang akan menjelaskan hubungan variabel-variabel dalam penelitian ini dengan menggunakan model

regresi linier berganda. Adapun persamaan regresi linier berganda tersebut, adalah sebagai berikut:

$$Y_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_{1i} + \hat{\beta}_2 X_{2i} + \hat{\beta}_3 X_{3i} + \hat{\beta}_4 X_{4i} + \varepsilon; i = 1, 2, 3, \dots, n$$

Dimana :

$Y$  = Pertumbuhan ekonomi (% /tahun)

$\hat{\beta}_0$  = Intersep

$\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3, \hat{\beta}_4$  = Koefisien regresi (Statistik)

$X_1$  = Pengangguran (Juta Orang /tahun)

$X_2$  = Tenaga kerja (Juta Orang /tahun)

$X_3$  = Pengeluaran pemerintah (Miliar rupiah /tahun)

$X_4$  = Inflasi (% /tahun)

$\varepsilon$  = Galat (error term)

## Pengujian Hipotesis

Model analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis statistik berupa regresi linier berganda.

Ekananda (2015: 55) menyatakan bahwa:

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah. Jawaban tersebut masih perlu di uji kebenarannya. Seorang peneliti pasti akan mengamati sesuatu gejala, peristiwa, atau masalah yang menjadi fokus perhatiannya. Sebelum mendapatkan fakta yang benar, mereka akan membuat dugaan tentang gejala, peristiwa, atau masalah yang menjadi titik perhatiannya tersebut.

Hipotesis dalam penelitian ini di uji dengan menggunakan uji statistik yaitu uji t da uji

F.

### Uji Parsial (Uji-t)

Untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas (pengangguran, tenaga kerja, pengeluaran pemerintah dan inflasi) secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel terikat (pertumbuhan ekonomi), maka dilakukan pengujian dengan uji-t dengan taraf nyata  $\alpha = 5\%$ .

#### 1. Pengangguran (X1)

$H_0 : \hat{\beta}_1 = 0$ , artinya pengangguran tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2001-2021.

$H_1 : \hat{\beta}_1 < 0$ , artinya pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2001-2021.

Rumus untuk mencari  $t_{hitung}$  adalah :

$$t_h = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{S(\hat{\beta}_1)}$$

$\hat{\beta}_1$  : Koefisien regresi (Statistik)

$\beta_1$  : Parameter

$S(\hat{\beta}_1)$  : Simpangan baku koefisien regresi sampel

Apabila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kemudian Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya pengangguran secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

#### 2. Tenaga Kerja (X2)

$H_0 : \hat{\beta}_2 = 0$ , artinya tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2001-2021.

$H_1 : \hat{\beta}_2 > 0$ , artinya tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2001-2021.

Rumus untuk mencari  $t_{hitung}$  adalah :

$$t_h = \frac{\hat{\beta}_2 - \beta_2}{S(\hat{\beta}_2)}$$

$\hat{\beta}_2$  : Koefisien regresi (Statistik)

$\beta_2$  : Parameter

$S(\hat{\beta}_2)$  : Simpangan baku koefisien regresi sampel

Apabila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemudian Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya tenaga kerja secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

### 3. Pengeluaran Pemerintah (X3)

$H_0 : \hat{\beta}_3 = 0$ , artinya pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2001-2021.

$H_1 : \hat{\beta}_3 > 0$ , artinya pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2001-2021.

Rumus untuk mencari  $t_{hitung}$  adalah :

$$t_h = \frac{\hat{\beta}_3 - \beta_3}{S(\hat{\beta}_3)}$$

$\hat{\beta}_3$  : Koefisien regresi (Statistik)

$\beta_3$  : Parameter

$S(\hat{\beta}_3)$  : Simpangan baku koefisien regresi sampel

Apabila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemudian Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya pengeluaran pemerintah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

#### 4. Inflasi (X4)

$H_0 : \hat{\beta}_4 = 0$ , artinya inflasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2001-2021.

$H_1 : \hat{\beta}_4 < 0$ , artinya inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2001-2021.

Rumus untuk mencari  $t_{hitung}$  adalah :

$$t_h = \frac{\hat{\beta}_4 - \beta_4}{S(\hat{\beta}_4)}$$

$\hat{\beta}_4$  : Koefisien regresi (Statistik)

$\beta_4$  : Parameter

$S(\hat{\beta}_4)$  : Simpangan baku koefisien regresi sampel

Apabila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemudian Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ ,

maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya inflasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Koefisien regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai *probability* dengan taraf signifikannya. Apabila nilai signifikansi  $< 0,05$  maka koefisien variabel tersebut signifikan mempengaruhi variabel terikat dan sebaliknya. Pengujian terhadap hasil regresi dilakukan dengan menggunakan uji t pada derajat keyakinan 95% atau  $\alpha = 5\%$  dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jika nilai *probability* t-statistik  $< 0,05\%$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.
2. Jika nilai *probability* t-statistik  $> 0,05\%$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

### **Uji Secara Simultan (Uji-F)**

Uji-F merupakan sebuah uji untuk mempelajari pengaruh seluruh variabel bebas secara bersama-sama, melalui pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. Maka hipotesis untuk Uji-F adalah:

- a. Membuat hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) sebagai berikut:

$H_0 : \hat{\beta}_1 = \hat{\beta}_2 = \hat{\beta}_3 = \hat{\beta}_4 = 0$ , berarti variabel bebas secara serempak/bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

$H_1 : \beta_i$  tidak semua nol,  $i = 1, 2, 3, 4$ , berarti variabel bebas secara serempak/bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

- b. Mencari nilai F hitung ada nilai kritis F statistik dari tabel F. Nilai kritis F berdasarkan  $\alpha$  dan df numerator ( $k-1$ ) dan df untuk denominator ( $n-k$ ).

Rumus untuk mencari nilai  $F_{hitung}$  adalah



$$F_{hitung} = \frac{JKR(k-1)}{JKG(n-k)}$$

JKR : Jumlah Kuadrat Regresi

JKG : Jumlah Kuadrat Galat

k : Banyaknya koefisien regresi

n : Banyaknya sampel

Apabila nilai  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima, artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, bila nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  di tolak, artinya secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Uji F disebut juga uji kelayakan model yang digunakan untuk mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Layak berarti bahwa model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 5%. Dasar pengambilan keputusan :

1. Jika probabilitas (signifikan)  $< 0,05$  atau  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka ditolak dan diterima.
2. Jika probabilitas (signifikan)  $> 0,05$  atau  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka diterima dan ditolak.

### **Uji Kebaikan Suai : Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Uji kebaikan-suai bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi linier berganda yang digunakan sudah sesuai menjelaskan hubungan antara variabel tak bebas dengan variabel-variabel bebas. Untuk melihat kebaikan-suai model digunakan koefisien determinasi  $R^2$  untuk mengukur seberapa besar keragaman variabel tak bebas yang dapat dijelaskan oleh keragaman variabel-variabel bebas. Nilai koefisien determinasi  $R^2$  adalah antara 0 dan 1. Jika  $R^2$  mendekati

angka satu artinya “semakin angkanya mendekati 1 maka semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya”.Widarjono (2013 : 24).

## **Uji Penyimpangan Asumsi Klasik**

### **Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk hubungan apakah hubungan diantara variabel bebas memiliki masalah multikorelasi (gejala multikorelasi) atau tidak. Multikorelasi adalah korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah yang terjadi pada hubungan diantara variabel bebas. (Widarjono, 2013:101)

Ada beberapa cara mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas, sebagai berikut:

1. Bila nilai Tolerance  $> 0,10$  dan nilai VIF (*Variance Inflation Factors*)  $< 10$ , disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen pada model regresi.
2. Bila nilai Tolerance  $< 0,10$  dan nilai VIF (*Variance Inflation Factors*)  $> 10$ , disimpulkan bahwa terdapat gejala multikolinearitas antar variable independen pada model regresi.

Cara mengatasi Multikolinearitas :

Jika model mengandung multikolinearitas menurut Widarjono (2013:108-109) ada 2 pilihan yaitu membiarkan model tetap mengandung multikolinearitas atau memperbaiki supaya terbebas dari masalah multikolinearitas.

1. Tanpa Ada Perbaikan

Masalah multikolinearitas biasanya timbul karena kita hanya mempunyai jumlah observasi yang sedikit, artinya kita tidak punya pilihan selain tetap menggunakan model untuk analisis regresi walaupun mengandung masalah multikolinearitas.

## 2. Dengan Perbaikan

### a. Menghilangkan Variabel Independen

Dengan menghadapi persoalan serius tentang multikolinearitas, salah satu metode yang dapat dilakukan adalah dengan menghilangkan salah satu variabel independen yang mempunyai hubungan linear kuat.

### b. Penambahan Data

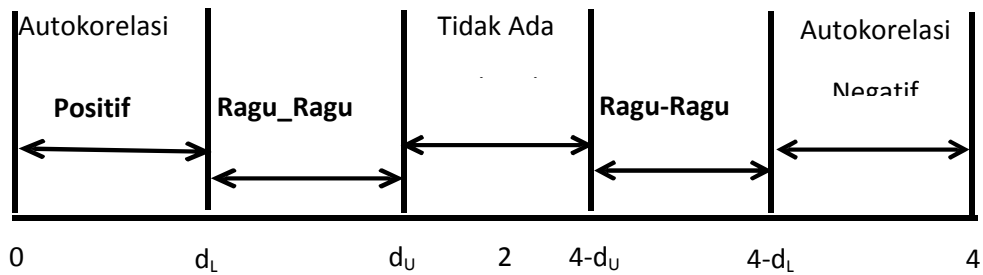
Masalah multikolinearitas pada dasarnya merupakan persoalan sampel. Oleh karena itu masalah multikolinearitas sering sekali bisa diatasi dengan menambah jumlah data.

## Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Ada beberapa cara untuk menguji keberadaan serial autokorelasi, yaitu: Uji Durbin-Watson dilakukan dengan membandingkan DW hitung dengan DW tabel. Jika terdapat autokorelasi maka galat tidak lagi minim sehingga penduga parameter tidak lagi efisien.

Uji Durbin-Watson dirumuskan berupa jumlah sampel dan jumlah variabel tidak bebas tertentu diperoleh dari nilai kritis  $d_L$  dan  $d_U$  dalam tabel distribusi Durbin-Watson untuk berbagai nilai  $\alpha$ .

Secara umum bisa diambil patokan :



**Gambar 3. 1 Uji Durbin-Watson**

- $0 < d < d_L$  : Menolak hipotesis 0 (ada autokorelasi positif)
- $d_L \leq d \leq d_U$  : Daerah Keragu-raguan (tidak ada keputusan)
- $d_U < d < 4 - d_U$  : Gagal Menolak Hipotesis 0 (Tidak Ada Autokorelasi Positif atau Negatif)
- $4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$  : Daerah Keragu-raguan (tidak ada keputusan)
- $4 - d_L < d < 4$  : Menolak Hipotesis 0 (ada autokorelasi negatif)

Apabila uji yang dihasilkan tidak menghasilkan keputusan maka perlu digunakan uji alternatif lainnya untuk mendeteksi ada atau tidak autokorelasi dalam model yang digunakan, maka digunakan uji yaitu uji run. Uji run merupakan bagian dari statistika nonparametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar galat terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar galat (residu atau kesalahan pengganggu) tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa galat adalah acak atau random.

Ghozali (2013:108) berpendapat “Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak”. Cara yang digunakan dalam uji run adalah sebagai berikut:

$H_0$  : Galat (res\_1) random (acak)

$H_1$  : Galat (res\_1) tidak random

## Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel galat atau residu memiliki sebaran normal. Penggunaan uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai galat menyebar normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Untuk mendeteksi apakah galat menyebar normal atau tidak digunakan uji statistik. Analisis Statistik untuk menguji apakah galat atau residu menyebar normal atau tidak digunakan analisis uji statistik menggunakan grafik dapat memberikan kesimpulan yang tidak tepat kalau tidak hati-hati secara visual.

Menurut Ghozali (2013: 154) bahwa untuk menguji apakah sebaran galat pendugaan regresi menyebar normal atau tidak, dapat digunakan uji statistik lain yaitu uji statistik nonparametrik Kolmogorof-Sminov ( K-S ). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis sebagai berikut :

$H_0$  : Data galat (residu) menyebar normal.

$H_1$  : Data galat tidak menyebar normal.

Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 berarti galat menyebar normal.

## Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. **Pertumbuhan Ekonomi (Y)**

Pertumbuhan ekonomi adalah Peningkatan dalam PDB Indonesia yang dihitung atas dasar PDB harga konstan yang dinyatakan dalam satuan persen per tahun.

### 2. **Pengangguran (X1)**

Pengangguran yang digunakan adalah pengangguran terbuka yang berarti penduduk Indonesia yang termasuk angkatan kerja (15 tahun ke atas) yang tidak bekerja atau sedang

mencari pekerjaan dan yang mempersiapkan usaha di Indonesia yang dinyatakan dalam satuan Orang per tahun.

### **3. Tenaga Kerja (X2)**

Tenaga kerja adalah penduduk Indonesia yang berada pada usia kerja, biasanya yang tergolong usia kerja adalah 15-64 tahun dan dalam tenaga kerja termasuk semua orang yang bekerja serta memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh setiap instansi atau pun lembaga yang terdapat di Indonesia. Data dinyatakan dalam satuan Orang per tahun.

### **4. Pengeluaran Pemerintah (X3)**

Pengeluaran pemerintah merupakan jumlah pengeluaran atau belanja negara Indonesia dari dana yang sudah disalurkan baik melalui belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah dan dana desa. Data diperoleh dari ringkasan APBN 2000-2021 yang dinyatakan dalam satuan miliar rupiah per tahun.

### **5. Inflasi (X4)**

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum di Indonesia yang diukur dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK). Inflasi dalam penelitian ini dinyatakan dalam satuan persen per tahun.